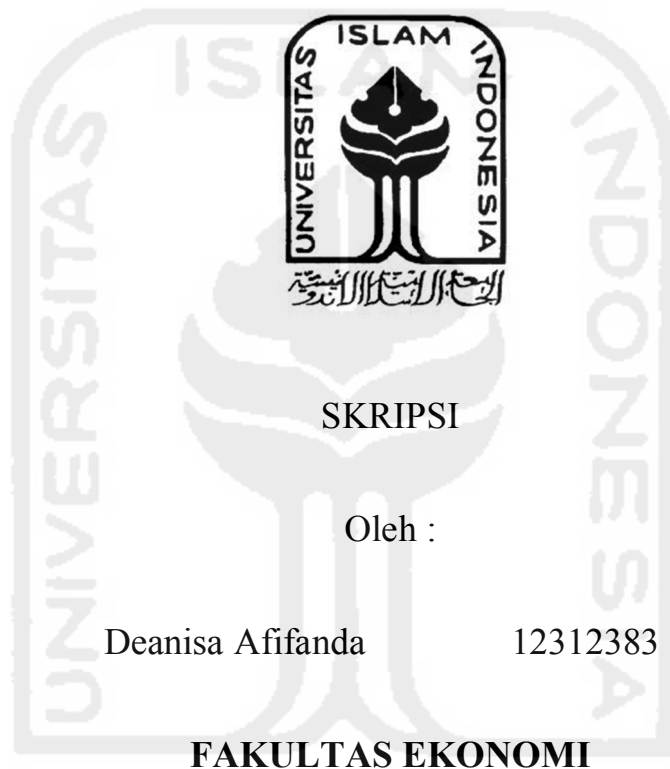


**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Oleh :

Deanisa Afifanda

12312383

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Deanisa Afifanda 12312383

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Penulis .



**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
JAWA TENGAH**



Dosen Pembimbing,

(Johan Arifin SE, M.Si, Ph.D)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DIY DAN JATENG

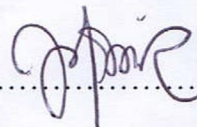
Disusun Oleh : **DEANISA AFIFANDA**

Nomor Mahasiswa : **12312383**

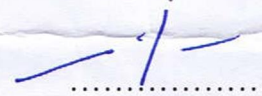
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 20 Februari 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

.....


Penguji : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.

.....


Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

Halaman Motto

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

(HR. Thabrani)

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil' alamin.

Penelitian berjudul "*Pengaruh Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah*" disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani keseharian sebagai seorang muslim

yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya. Penulis sangat bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, Ya Rabb.

2. Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah yang selalu merindukan ummatnya, suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, pelajar dan calon pemimpin di masa mendatang.
3. Bapak Suryanto S.Pd.,MM dan Ibu Dra Herry Widayati yang sudah rela menjadi relawan kehidupan penulis dari kelahiran , masa kecil, masa pertumbuhan dan hingga saat ini dan pastinya terus menerus menjadi penyemangat kehidupan penulis. Terima kasih sudah menjadi tempat penulis mencurahkan seluruh keluh kesah, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan yang ternyata tidak semudah dan seenak seperti dalam sinetron maupun didalam film yang biasa penulis tonton, dan selalu mengingatkan bahwa hidup ini banyak rintangan dan cobaan serta untuk mencari keridhaan Allah SWT semata. Semoga keluarga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam ridho-Nya.
4. Ade Panggiring dan Aldhebaran F. Kafka selaku suami dan anak penulis yang selalu tak henti-hentinya memberikan support kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
5. Nadya Bella Amira, Rizaldi Naufal Herdanto, Salmalita Ferasa selaku adik kandung penulis. Terimakasih sudah selalu menjadi saudara yang

menyenangkan bagi penulis, semoga bisa selalu akur dan saling memberikan support hingga waktu yang tidak dapat dipastikan.

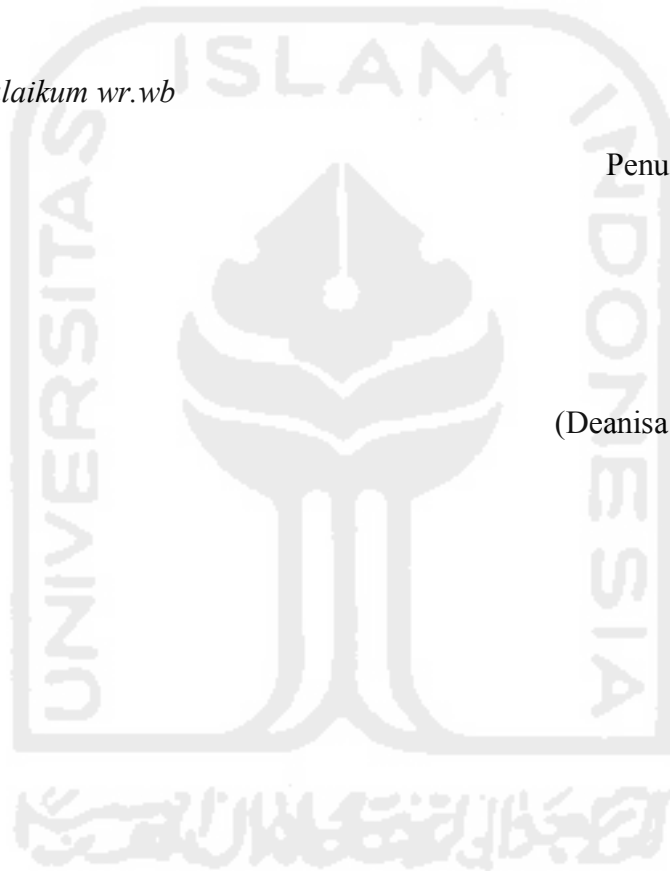
6. Bapak Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Salah satu guru yang mengajarkan penulis tentang menjadi seorang pribadi yang sabar dan berkarakter sehingga dapat menjadi pribadi yang dapat bersaing nantinya, terima kasih sudah membimbing penulis dalam dunia perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada bapak beserta keluarga.
7. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi atas segala ilmu yang penulis peroleh.
8. Fitria Amelyani, Rizky Oktavanila, Maharani Triputriadi (CANTIK) selaku sahabat dari awal kuliah hingga saat ini semoga persahabatan ini langgeng sampai waktu yang tidak dapat diprediksikan. Terimakasih selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis serta memberikan warna kehidupan selama masa kuliah.

9. Abel Sambodo dan M. Faldi Bastian selaku sahabat penulis yang hampir setiap hari menemani kemanapun penulis pergi selama dijogja. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat berkesan bagi penulis.

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis,

(Deanisa Afifanda)



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Landasan Teori..... | 7 |
| 2.2. Hipotesis Penelitian | 19 |
| 2.3. Kerangka pemikiran..... | 24 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | | |
|------|---|----|
| 3.1. | Populasi dan Sampel Penelitian | 25 |
| 3.2. | Jenis dan Sumber Data..... | 26 |
| 3.3. | Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian | 27 |
| 3.4. | Metode Analisis Data..... | 29 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | | |
|------|-------------------------------------|----|
| 4.1. | Analisis Statistik Deskriptif | 34 |
| 4.2. | Uji Asumsi Klasik | 36 |
| 4.3. | Analisis Regresi Berganda | 40 |
| 4.5. | Pembahasan..... | 44 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | | |
|------|-------------------------------|----|
| 5.1. | Kesimpulan | 50 |
| 5.2. | Keterbatasan Penelitian | 51 |
| 5.3. | Saran | 52 |

| | |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Lampiran | 57 |
|----------------|----|

DAFTAR TABEL

Tabel

| | |
|--|----|
| 3.1. Observasi Penelitian | 26 |
| 4.1. Analisis Statistik Deskriptif..... | 34 |
| 4.2. Output Uji Normalitas..... | 37 |
| 4.3. Output Uji Multikolinieritas | 38 |
| 4.5. Output Uji Autokorelasi | 40 |
| 4.6. Output Regresi Linier Berganda..... | 41 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar

| | |
|--|----|
| 2.1. Kerangka Pemikiran | 24 |
| 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas | 39 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Daftar Sampel Penelitian | 57 |
| 2. Data Penelitian..... | 59 |
| 3. Data Hasil Olah Data | 69 |



ABSTRAK

Perubahan perkembangan tata kelola pemerintah daerah ditandai dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang bertujuan agar setiap daerah dapat mandiri dalam melakukan pembangunan daerahnya dalam bentuk belanja modal yang berguna untuk menambah aset tetap daerah. Sampel penelitian ini menggunakan 40 kota/kabupaten yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam membuat kebijakan publik terutama berkaitan dengan belanja modal

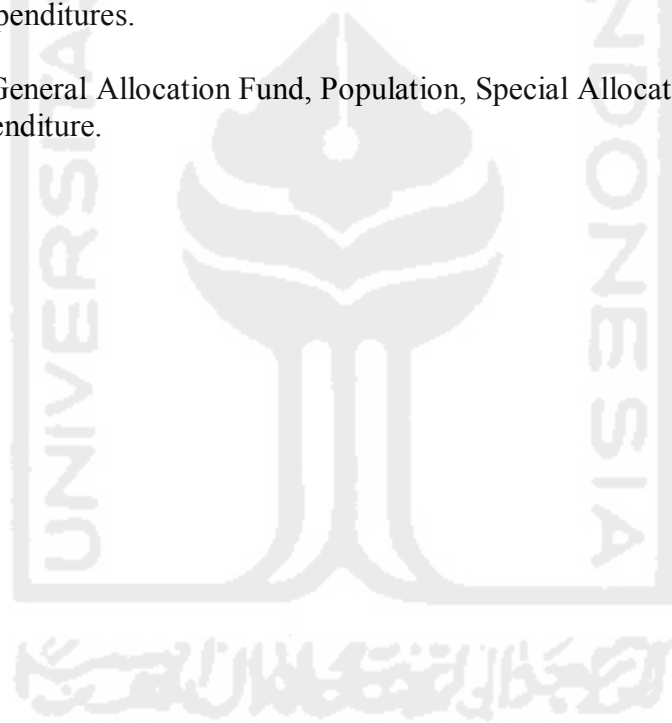
Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.



ABSTRACT

Changes in the development of local governance is characterized by the presence of local autonomy and fiscal decentralization, which have purpose to make every region becomes independent in conducting their regional development in the form of capital expenditure that is useful to increase the fixed assets of region. Sample of the research is using the 40 cities/districts in the province of Special Region Yogyakarta and Central Java. Regression analysis results show that the General Allocation Fund and Special Allocation Fund have significant positive effect on capital spending, while the variable of Total Population has no significant effect on capital expenditure. Thus the local government is expected to consider the General Allocation Fund and Special Allocation Fund in making public policy mainly related to capital expenditures.

Keywords: General Allocation Fund, Population, Special Allocation Fund, and Capital Expenditure.



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Perkembangan tata kelola pembangunan daerah dalam sepuluh tahun terakhir di Indonesia telah ditandai dengan perubahan mendasar pada dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek ekonomi. Pada aspek politik tercermin pada semakin kuatnya kewenangan daerah dalam menentukan berbagai kebijakan di daerah, sedangkan dimensi ekonomi ditandai dengan adanya kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang semakin besar. Dua hal tersebut merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*), mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*), dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya, serta keinginan masyarakat di daerah masing-masing dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merealisasikan pendapatan yang mereka terima dengan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Desentralisasi juga merupakan pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggungjawaban yang diikuti dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan pelayanan publik (*public service*). Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan pemerintah daerah (*local government financial management*) dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah (Sriyana, 2011).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2007). Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk

belanja rutin. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat.

Sumber pembiayaan yang penting bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Potensi keuangan daerah yang tidak sama antar daerah menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirilah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,42% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi dana perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran pemerintah daerah sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama

pendapatan daerah. Pada tahun 2007 persentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DJPK-Kemenkeu, 2011). Dana Alokasi Umum masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah dari Dana Alokasi Umum dan untuk provinsi sekitar 30%.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang meneliti mengenai pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada $\alpha = 1\%$. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menambah variabel independen lain yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Jumlah Penduduk (JP).

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian pemerintah kabupaten kota di Jawa tengah dan DIY. Hal yang menjadi pertimbangan penulis memilih Provinsi DIY dan Jawa Tengah sebagai obyek penelitian adalah adanya peningkatan belanja modal di Provinsi DIY dan Jawa Tengah selama lima tahun terakhir (DJPK, 2015). Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah DIY memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian di daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kota di DIY dan Jawa Tengah”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah DAU berpengaruh terhadap belanja modal ?
- b. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal ?
- c. Apakah DAK berpengaruh terhadap belanja modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh DAU, Jumlah Penduduk dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis khususnya di bidang pengalokasian belanja modal di tiap-tiap Provinsi di Indonesia. dan Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah provinsi terkait pemanfaatan DAU dan DAK terhadap pengalokasian belanja modal.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang berisi tentang, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel-variabel penelitian, dan analisis data.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan data khusus yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang telah ditentukan berdasarkan alat dan langkah analisis sehingga akan membawa ke tujuan dan sasaran penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab II merupakan bab yang akan membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri dari landasan teori penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran teoritis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tugas utama dari anggaran adalah mengendalikan aktivitas fiskal pemerintah, mengkaji tindakan sebelumnya dan mengetahui program pemerintah di masa yang akan datang. Anggaran daerah mengetahui posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah.

Beberapa pengertian APBD menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Bastian (2002) mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja Pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik

2. Nordiawan, et.al (2007), APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Mardiasmo (2005), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

2.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik

Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Bastian, 2002).

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006)

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah (Ardhini, 2011).

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan(Ardhini, 2011).

Belanja modal jenis Pelayanan Publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri atas belanja tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan. Belanja modal untuk pelayanan publik disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Ardhini, 2011).

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) mengenai pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan

Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal. Data sampel terdiri dari 292 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada $\alpha = 1\%$. Ini mengindikasikan bahwa DAU yang dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar namun hanya digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti untuk gaji pegawai. Sedangkan PAD walaupun kecil dalam proporsi penerimaan namun sangat berpengaruh pada alokasi belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa PAD merupakan sumber penting pendapatan yang akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Penelitian Wandira (2013) yang meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah (2012) yang bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota, dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah 21 kabupaten/kota, sehingga jumlah amatan yang dianalisis menjadi 105. Data yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan realisasi PAD, DAU serta belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Data tersebut bersumber dari DJKD Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (Path Analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ardhini (2011) meneliti dengan tujuan untuk menguji apakah rasio keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah metode statistik dengan perangkat SPSS (Statistical Package for the Social) 17.00. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal, tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, SILPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan dengan Rasio Gini.

Adiwiyana (2011) yang meneliti mengenai Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Modal Penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki efek pada belanja Modal. Ini berarti pemerintah daerah mampu memprediksi belanja Modal yang didasarkan pada PAD dan DAU. Sedangkan pertumbuhan ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh pada belanja Modal.

2.1.4 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, terdapat prinsip *money follow function* yang merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip ini arti bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan akan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal memiliki tiga misi utama, yaitu (Barzelay,(1991) dalam Hadi(2009)):

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Untuk mewujudkan ketiga misi tersebut maka dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terdapat kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk meningkatkan pendapatan melalui pemungutan pajak (*taxing powering*) yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan

asumsi dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat daerahnya sehingga dapat terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan negara (Hadi, 2009).

2.1.5 Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2002).

Menurut Halim (2002) ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk

menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (Halim, 2002). Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2002):

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk

Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

2.1.6 Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik(2014), mendefinisikan bahwa yang termasuk penduduk suatu wilayah adalah ketika dilakukan pencacahan memiliki karakteristik : tinggal diwilayah itu secara menetap atau sudah enam bulan atau lebih; tinggal di wilayah kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap; sedang bepergian ke wilayah lain kurang dari enam bulan dan tidak bermaksud menetap di wilayah tujuan; serta mereka yang yang bertempat tinggal di wilayah itu dengan mengontrak/kos/sewa untuk bekerja atau sekolah yang kemungkinan pindah lagi karena berbagai alasan (Badan Pusat Statistik, 2014). Simanjuntak (2012) menyatakan penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara. Pengertian penduduk pada penelitian ini memakai konsep Badan Pusat Statistik. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Variabel jumlah penduduk dalam penelitian ini adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan orang.

2.1.7 Dana Alokasi Khusus.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi-tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Menurut UU yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004), wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Dalam sebuah proses penyusunan anggaran ada sebuah teori yang dikenal dengan istilah incrementalism. Sistem penganggaran Incrementalism adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan. *Incremental Budgeting* merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya. Permasalahan yang harus diputuskan bersama adalah metode kenaikan/penurunan (*incremental*) dari angka anggaran tahun sebelumnya. Logika sistem anggaran ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya. Penyusunan anggaran yang bersifat inkremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran pada tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau

jumlah penduduk (Bastian, 2002). Salah satunya adalah penentuan DAU dan belanja modal yang merupakan kelanjutan penganggaran dari tahun sebelumnya

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006, dalam Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam

pengelolaan keuangan. Variabel DAU berpengaruh terhadap anggaran belanja modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Adiwiyana (2012) menemukan hasil DAU mempengaruhi belanja modal daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah H1: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Nugraeni, 2011). Salah satu potensi ekonomi adalah jumlah penduduk.

Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Devita et.al, 2014).

Belanja modal yang dilakukan oleh daerah pada dasarnya adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap publik, baik berupa sarana dan prasarana yang akan menunjang efektif dan efisiennya pelayanan tersebut. Penduduk yang semakin banyak akan membutuhkan pelayanan yang semakin banyak pula dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan membutuhkan belanja modal yang besar pula (Budi, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah

H2: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.2.3 Pengaruh DAK terhadap alokasi belanja modal.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Bappenas, 2011).

Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan

beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD (Bappenas, 2011).

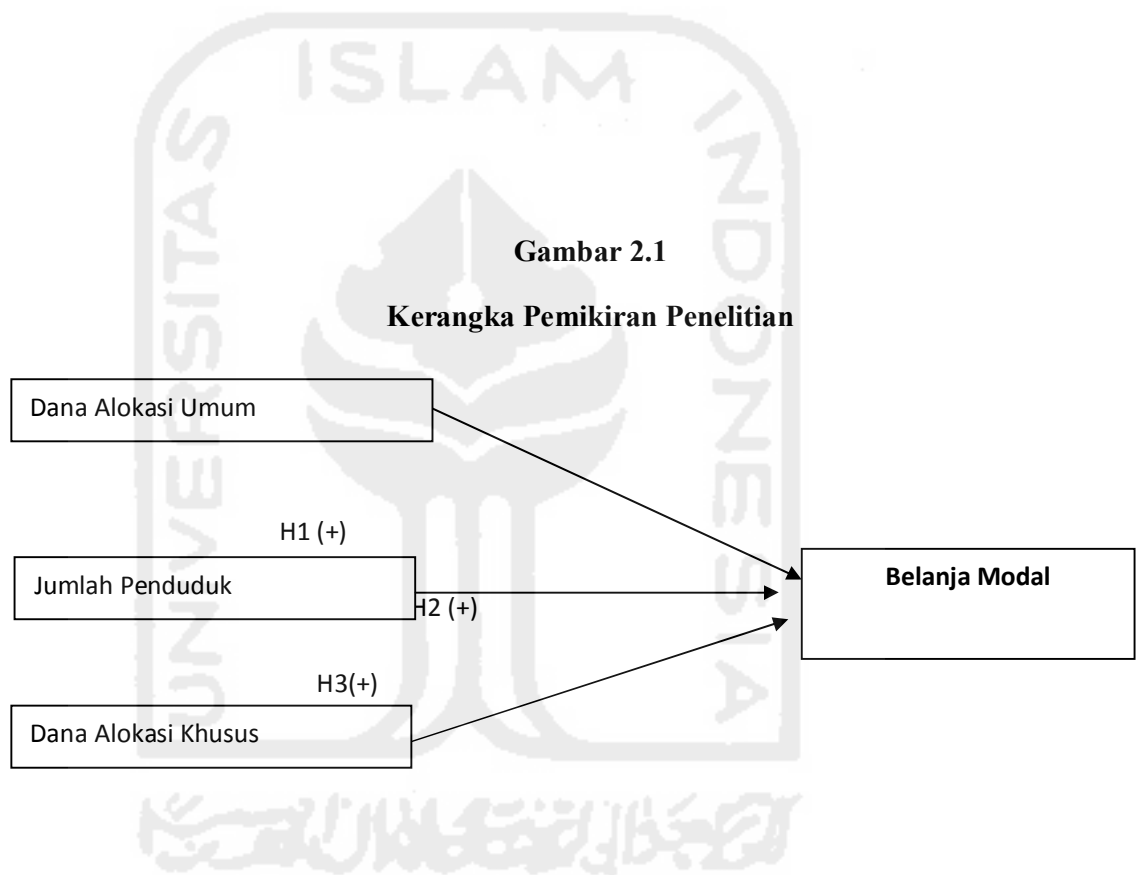
Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Permatasari dan Midalwati, 2016).

Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Wandira (2013) menemukan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab III akan membahas mengenai metode penelitian yang merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Bab ini terdiri dari populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel dan definisi operasional variabel penelitian, dan analisis data.

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Kabupaten/kota di DIY Jateng. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Sugiyono, 2010).

Sampel adalah bagian dari penelitian yang dilakukan dengan mengambil populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2010). Sampel penelitian ini adalah Kabupaten Kota di DIY Jateng dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota di DIY Jateng yang mempublikasikan laporan APBD dalam situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik 2013-2015.
2. Kabupaten/kota di DIY Jateng yang mempublikasikan laporan APBD-nya selama periode tahun 2013-2015.

Kriteria diatas digunakan dalam penelitian ini karena tidak semua pemerintah daerah menyediakan secara menyeluruh mengenai informasi

keuangan yang dibutuhkan. Dengan kriteria penentuan sampel yang telah ditetapkan, maka sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 40 kabupaten/kota dengan periode amatan 3 tahun diperoleh jumlah observasi penelitian adalah 120. Adapun populasi, sampel dan jumlah observasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Observasi Penelitian

| No | Keterangan | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|------|------|
| 1 | Kabupaten/kota di DIY Jateng yang mempublikasikan laporan APBD dalam situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik 2013-2015 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Kabupaten/kota di DIY Jateng yang tidak mempublikasikan laporan APBD-nya selama periode tahun 2013-2015 | (0) | (0) | (0) |
| 3 | Observasi | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Total Observasi | 120 | | |

Sumber : Data Diolah, 2016

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan APBD. Data dalam penelitian ini menggunakan data *time series* berupa laporan keuangan kabupaten/kota yang berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan APBD. Data Dana Alokasi Umum, dan

DAK menggunakan data Realisasi Anggaran. Data dan jumlah penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian di atas adalah belanja modal. Variabel ini diukur dari jumlah belanja modal yang ada di Laporan Realisasi APBD per Kota/Kabupaten di Provinsi DIY Jateng.

Pada penelitian ini, belanja modal diukur dengan menggunakan Ln belanja modal. Penggunaan *natural log* (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih. Jika nilai belanja modal langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan *natural log*, nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$\text{Belanja Modal} = Ln (\text{belanja modal})$$

2. Variabel Independen

a. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel ini diukur dari jumlah DAU yang ada di Laporan Realisasi APBD per Kota/Kabupaten di DIY Jateng.

Pada penelitian ini, belanja modal diukur dengan menggunakan Ln DAU. Penggunaan *natural log* (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih. Jika nilai DAU langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan *natural log*, nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$DAU = Ln (DAU)$$

b. Jumlah Penduduk

Pada penelitian ini, jumlah penduduk diukur dengan menggunakan Ln jumlah penduduk. Penggunaan *natural log* (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih. Jika nilai jumlah penduduk langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan *natural log*, nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$JP = Ln (\text{Jumlah penduduk})$$

c. Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang diukur dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional. Pada penelitian ini, DAK diprosikan dengan menggunakan Ln DAK. Penggunaan *natural log* (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih. Jika nilai

DAK langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan *natural log*, nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$DAK = Ln (DAK)$$

3.4 Analisis Data

3.4.1 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel utama keuangan yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan untuk kurun waktu tahun 2013-2015. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi yang digunakan dapat digunakan sebagai dasar estimasi yang tidak bias. Terutama untuk data yang banyak, perlu menggunakan uji asumsi klasik untuk lebih meyakinkan kesesuaian antara model persamaan regresi tersebut. Adapun tahapan pengujian asumsi klasik menurut Ghazali (2006) ada empat tahap, yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi data

yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas data menggunakan analisis uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Dasar pengambilan keputusan pada analisis *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2006):

- a. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal

2. Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi di mana ada korelasi antara variabel bebas (independen) satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini multikolinieritas terindikasi apabila terdapat hubungan linier antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *Variance Inflation Faktor (VIF)*. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yang digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi mengandung perbedaan variansi residu dari kasus pengamatan satu ke kasus pengamatan lainnya. Jika variansi residu dari kasus pengamatan satu ke kasus pengamatan lainnya mempunyai nilai tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika mempunyai perbedaan maka

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki homoskedastisitas dan bukannya memiliki heteroskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Dasar analisisnya adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan adanya kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan *time series*. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui uji *Durbin Watson*.

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi berganda, dengan alasan bahwa dalam penelitian ini melibatkan beberapa variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Adapun model dari regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{LNBM} = \alpha + \beta_1 \text{LNDAU} + \beta_2 \text{LNJP} + \beta_3 \text{LNLW} + \beta_4 \text{LNDAK} + e$$

Dimana :

BM : Belanja Modal

α : Konstanta

DAU : Dana Alokasi Umum

LW : Luas Wilayah

JP : Jumlah Penduduk

DAK : Dana Alokasi Khusus

β : Koefisien Regresi

e : Error

3.4.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi variabel bebas pada model dapat menerangkan oleh variabel terikat (Ghozali, 2006). Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t). Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$ berarti variabel independen (DAU, PAD, SILPA, Luas Wilayah dan DAK) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Belanja modal) sedangkan jika nilai

signifikansi $> 0,05$ berarti variabel independen (DAU, PAD, SILPA, Luas Wilayah dan DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III telah dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis penelitian. Bab IV menjabarkan secara rinci mengenai output pengolahan data yang dilakukan serta pembahasan mengenai output data penelitian berupa analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011). Data akan disajikan dalam bentuk statistik deskriptif sebelum dilakukan pengujian untuk memberikan gambaran umum mengenai data variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.

Statistik Deskriptif

| Variabel Penelitian | n | Minimum | Maximum | Median | Mean | Std. Deviation |
|---------------------|-----|---------|---------|--------|---------|----------------|
| LN BM | 120 | 23,96 | 27,62 | 26,11 | 26,0975 | ,47874 |
| LN DAU | 120 | 26,60 | 27,92 | 27,47 | 27,4179 | ,29830 |
| LN JP | 120 | 11,22 | 15,12 | 13,70 | 13,5887 | ,66904 |
| LN DAK | 120 | 20,15 | 25,43 | 24,81 | 24,6222 | ,70872 |

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Nilai minimum dan maksimum belanja modal pada kabupaten/kota di Jateng dan DIY adalah sebesar 23,96 dan 27,62. Nilai minimum terjadi pada Kota Salatiga sebesar 23,96 atau Rp. 25.458.694.442,00 sedangkan nilai belanja

modal tertinggi sebesar 27,62 atau Rp.990.118.124.350,- terjadi pada Kota Semarang. Nilai rata-rata belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 26,0975 atau Rp. 215.774.560,887,-. Nilai median dari variabel belanja modal adalah sebesar 26,11 dengan nilai standar deviasi dari variabel belanja modal adalah sebesar 0,47874.

2. Nilai minimum dan maksimum dana alokasi umum pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 26,60 atau Rp. 358.331.867.000,- dan 27,92 atau 1.332.536.848.000,-. Nilai minimum DAU diperoleh kota Salatiga sedangkan nilai maksimum DAU diperoleh Kabupaten Cilacap. Nilai rata-rata DAU diartikan sebagai tingkat kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah sebesar 27,4179 atau Rp. 808.058.262.563,-. Nilai median dari variabel DAU adalah sebesar 24,8061 dengan nilai standar deviasi dari variabel DAU adalah sebesar 0,29830.
3. Nilai minimum dan maksimum dana alokasi khusus (DAK) pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 20,15 atau Rp. 561.100.000,- dan 25,43 atau Rp. 110.203.960.000,-. Nilai minimum DAK diperoleh kota Yogyakarta dan nilai maksimum diperoleh Kabupaten Cilacap. Nilai rata-rata dana alokasi khusus (DAK) diartikan sebagai dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional adalah sebesar 24,6222 atau Rp. 49.349.822.201,-. Nilai median dari variabel DAK adalah

sebesar 24,8061 dengan nilai standar deviasi dari variabel DAK adalah sebesar 0,70872.

4. Nilai minimum dan maksimum jumlah penduduk pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 11,22 atau 74309 Jiwa dan 15,12 atau 3691196 Jiwa. Nilai minimum jumlah penduduk diperoleh Kabupaten Batang sedangkan nilai maksimum diperoleh Kota Yogyakarta. Nilai rata-rata jumlah penduduk adalah sebesar 13,5887. Nilai median dari variabel jumlah penduduk adalah sebesar 13,7023 dengan nilai standar deviasi dari variabel jumlah penduduk adalah sebesar 0,66904.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi data yang normal atau tidak dengan uji yang dipakai adalah *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikan $\alpha=0,05$. Apabila Sign hitung $> \alpha$, maka data terdistribusi normal. Sedangkan, jika sebaliknya maka data tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Output Uji Normalitas

| | Unstandardized Residual |
|------------------------|-------------------------|
| n | 120 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | ,636 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,813 |

Sumber: Output SPSS Diolah ,2016

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov seperti pada tabel 4.2. terlihat bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0,813 lebih tinggi daripada $\alpha = 5\%$. Dengan demikian data penelitian dalam model penelitian ini dapat dinyatakan normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan antara variabel prediktor atau independen terhadap variabel prediktor yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *tolerance* >0,10 maka model regresi berganda tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011).

Tabel 4.3.

Output Uji Multikolinearitas

| Variabel Independen | Collinearity Statistics | | Kesimpulan |
|---------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| | Tolerance | VIF | |
| LN DAU | ,293 | 3,408 | Tidak ada Multikolinieritas |
| LN JP | ,354 | 2,824 | Tidak ada Multikolinieritas |
| LN DAK | ,728 | 1,373 | Tidak ada Multikolinieritas |

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Dari hasil tabel 4.3., dapat diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian ini.

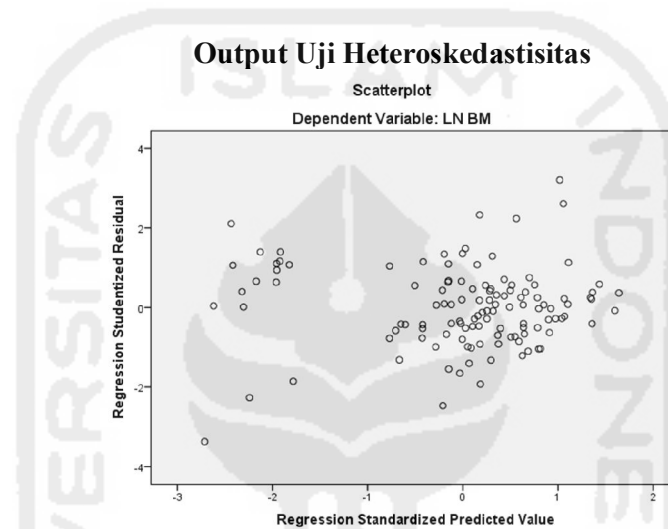
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas tujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian variabel dari satu pengamatan kepengamatan yang lainnya tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas terjadi bila *distrurbance term* untuk setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi bervariasi. Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah dengan metode Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Apabila terjadi pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, dan apabila tidak ada pola penyebaran maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011)

Hasil Uji Heteroskedastisitas tersebut dapat di ditunjukkan pada Gambar berikut:

Gambar 4.4.



Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Dari gambar 4.1. diatas dapat diketahui bahwa sebaran data residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu 0 Y dan tidak ada pola tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pada periode t dengan pelanggaran pada periode $t - 1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Tes ini dilakukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*, dimana data tersebut diketahui bahwa dalam jenis masalah *reoccurring* autokorelasi dapat

"mengganggu" antar data (Ghozali, 2011). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.

Output Uji Autokorelasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,654 ^a | ,427 | ,413 | ,38108 | 1,856 |

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Dari hasil tabel 4.4. di atas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,856. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai d_l dan d_u pada tingkat signifikansi 5%, dengan n sebesar 120 dan $k= 3$. Dengan menggunakan standar tersebut dihasilkan nilai d_l sebesar 1,63731 dan d_u sebesar 1,74715. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,856 berada diantara d_u (1,74715) dan $4-d_u$ ($4-1,74715= 2,25285$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji regresi linier berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.6.

Output Regresi Berganda

| Variabel Independen | Koefisien Regresi | T hitung | Signifikansi | Kesimpulan |
|---------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|
| Konstanta | -1,300 | 3,858 | ,774 | |
| LND AU | 0,834 | 3,858 | 0,000 | H1 didukung |
| LNJP | 0,003 | 0,029 | 0,977 | H2 tidak didukung |
| LND AK | 0,182 | 2,874 | 0,005 | H3 didukung |
| Fhitung | | 28,863 | 0,000 ^b | |
| Adjusted R Square | | 0,413 | | |

Variabel Dependen : LNBM

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Keterangan

BM : Belanja Modal

DAU : Dana Alokasi Umum

JP : Jumlah Penduduk

DAK : Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat diperoleh model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{LNBM} = -1,300 + 0,884\text{LNDAU} + 0,003\text{LNJP} + 0,182\text{LND AK}$$

Dari hasil model persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai *intercept konstanta* sebesar -1,300. Hasil ini dapat diartikan, apabila besarnya nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka besarnya belanja modal adalah -1,300.
2. Koefisien regresi LNDAU= 0,884. Hasil ini dapat diartikan, apabila dana

alokasi umum mengalami peningkatan 1 persen, maka besarnya modal akan meningkat sebesar 0,884 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

3. Koefisien regresi LNJP= 0,003. Hasil ini dapat diartikan, apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,003, dengan asumsi semua variabel independen konstan.
4. Koefisien regresi LNDAK = 0,182. Hasil ini dapat diartikan, apabila dana alokasi khusus mengalami peningkatan 1 persen, maka besarnya modal akan meningkat sebesar 0,182 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati 1 maka

makin baik kemampuan model tersebut menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.5

Hasil analisis koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,413. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel *independent* dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 41,3% dan sisanya sebesar 58,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.3.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ($\alpha=5\%$).

1. Pengujian Hipotesis pertama

Pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel DAU. Hipotesis H_1 penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi DAU yaitu 0,834 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sehingga H_1 penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel jumlah penduduk. Hipotesis H₂ penelitian ini menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Besarnya koefisien regresi jumlah penduduk yaitu 0,003 dan nilai signifikansi sebesar $0,977 > 0,05$. Hal ini berarti variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sehingga H₂ penelitian ini ditolak.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel dana alokasi khusus. Hipotesis H₃ penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi dana alokasi khusus yaitu 0,182 dan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Dengan demikian H₄ penelitian ini didukung.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAU akan meningkatkan belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka

berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006, dalam Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Variabel DAU berpengaruh terhadap anggaran belanja modal hal ini kemungkinan disebabkan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Hasil ini sesuai dengan penelitian Adiwiyana (2012) yang menemukan hasil DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012) yang menemukan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi belanja modal.

Hal ini kemungkinan disebabkan karena sarana prasarana dan infrastruktur pembangunan yang ada selama lima tahun terakhir ini masih layak dan memadai sehingga pemerintah daerah khususnya wilayah DIY dan Jateng tidak mengeluarkan anggaran untuk penambahan sarana prasarana maupun pembangunan sehingga jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Devita et.al (2015) yang meneliti di daerah Jambi dan penelitian Herlina (2013) yang meneliti di daerah Kabupaten Berau, Kalimantan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Budi (2013) di Pulau Jawa dan Widiagma (2013) di daerah Jawa Timur yang membuktikan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

4.4.3 Pengaruh DAK terhadap Belanja modal.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAK akan meningkatkan belanja modal.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Bappenas, 2011).

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011).

Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya

menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Bappenas,2011).

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Permatasari dan Midalwati, 2016).

Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten Kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan

pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Wandira, 2013).

Hasil ini sesuai penelitian Wandira (2013) yang menemukan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar(2011) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pada bab IV telah dijabarkan mengenai output penelitian pengolahan data beserta pembahasan didalamnya. Bab V menyampaikan berupa kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penelitian ini berhasil menemukan bahwa:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah adanya pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah, maka DAU yang diperolehnya tinggi, dan sebaliknya jika potensi fiskalnya tinggi, maka DAU yang diperoleh daerah bersangkutan akan rendah. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Jateng dan D.I. Yogyakarta kuat, sehingga tidak tergantung DAU dari Pemerintah Pusat untuk membiayai alokasi belanja modal daerah. Kabupaten/kota di Provinsi Jateng dan D.I. Yogyakarta sudah mampu mengelola DAU mereka sehingga kemandirian daerah dapat tercapai.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya jumlah penduduk tidak akan mempengaruhi belanja modal. Implikasi dari

hasil penelitian ini adalah penggunaan belanja modal harus disesuaikan dengan potensi penduduk suatu daerah, agar tidak salah dalam pengalokasian belanja modal. Jumlah penduduk merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan dalam mengelola daerahnya apabila suatu daerah ingin mencapai indeks pembangunan manusia sebagai human capital yang pada akhirnya akan ikut berdampak pada perekonomian daerah. Penggunaan belanja daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi penduduk yang ada akan berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAK akan meningkatkan belanja modal. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah penggunaan DAK secara optimal. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

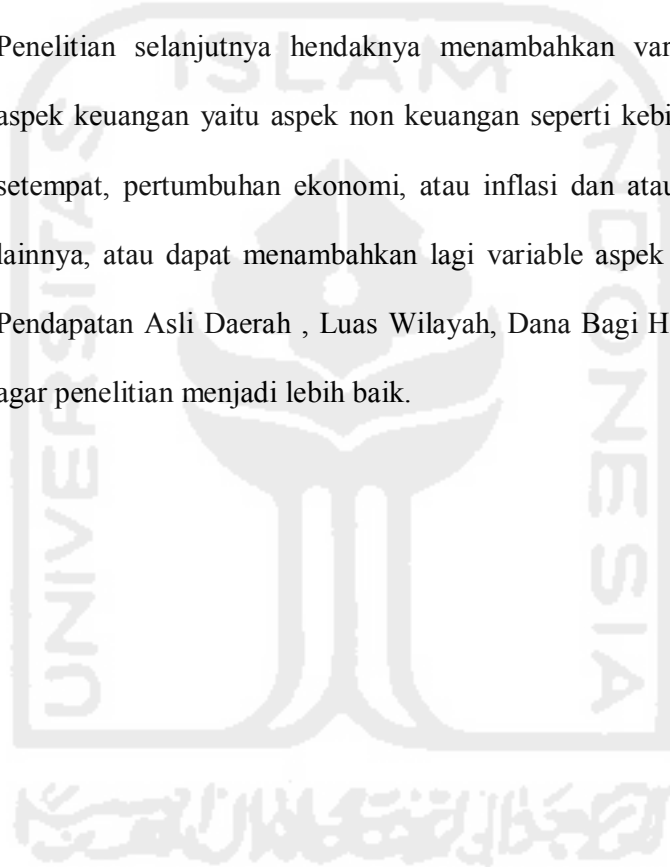
5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel hanya melalui situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tanpa mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

5.3 Saran

1. Peneliti berikutnya hendaknya mengambil sampel secara langsung melalui pemerintah daerah dengan mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan agar lebih relevan sehingga penelitian menjadi lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain diluar aspek keuangan yaitu aspek non keuangan seperti kebijakan pemerintah setempat, pertumbuhan ekonomi, atau inflasi dan atau faktor potensial lainnya, atau dapat menambahkan lagi variable aspek keuangan seperti Pendapatan Asli Daerah , Luas Wilayah, Dana Bagi Hasil dan lain-lain, agar penelitian menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiyan, P. (2011). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Skripsi* : Univesitas Diponegoro
- Ardhani, P. (2011). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ardhini. (2011). "Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)". *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bactiar, A. (2012). "Pemetaan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Menggunakan Tipologi Klassen Di Surabaya Dan Sekitarnya". e-prints UPN Jatim
- Bappenas. (2011). Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK). White Paper
- Bastian, I. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, Yogyakarta : BPFE
- Budi, B.S. (2013). Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Belanja Modal (Studi LKPD Se-Pulau Jawa Tahun 2011-2012). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Devita, Andri, A. Delis & Junaidi. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(1) : 63-70
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Deskripsi dan Analisis apbd 2011*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). *Deskripsi dan Analisis apbd 2015*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Fatmawati, S. & A. Riduwan. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 2(7) : 1-12
- Fawzyny, W. (2013). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011". *Skripsi* : UIN Syarif Hidayatullah

- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi, S. (2009). "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1) : 103-124
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat
- Harianto, D. & Hadi, A.P. (2007). "Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita". Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kusnandar & D. Siswantoro. (2012). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi 15
- Mardiasmo. (2005). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi: Yogyakarta
- Mawarni, Darwanis, S. Abdullah. (2013). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)". *Jurnal Akuntansi Universitas Syah Kuala* 2(2) : 80-90
- Maryadi. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012*. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Merianto, Edy, Betri, & Wenny, C.D. (2015). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatra Selatan". *Jurnal STIE Multi Data Palembang*. 2(1) : 1-13
- Nordiawan, I. & Maulidah. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta
- Pemendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.

- Permatasari, I. & T. Mildawati. (2016). "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(1) : 1-15
- Pratiwi, N. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi* : Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Setiyani, R. D. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten Di Karesidenan Pati Periode 2009-2013 . Naskah Publikasi
- Sholikhah, I. & A. Wahyudin. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*. 3(4) : 53-62
- Sianipar, E. S. (2011). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara
- Solikin, I. (2010). Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- Sriyana, J. (2011). "Disparitas Fiskal Antardaerah Di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1) : 56-66.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : ALFABETA
- Suhendar, I. M., N.L.G. Sulindawati & I.M. Adiputra. (2015). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Kota Di Bali Periode 2009-2013". *Jurusan Akuntansi Program SI* 3(1) : 1-13
- Tuasikal, A. (2008). "Pengaruh DAU, DAK, PAD dan Pdrb Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Indonesia". *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 2(1) : 142-155
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan. Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Wandira, A.G. (2013). "Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Accounting Analysis Journal*, 2(1) : 1-20

Widiagma, A.P. (2015). “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Timur”. Universitas Jember



LAMPIRAN 1
DAFTAR SAMPEL PENELITIAN

| No | Kabupaten Kota |
|----|-------------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara |
| 2 | Kab. Banyumas |
| 3 | Kab. Batang |
| 4 | Kab. Blora |
| 5 | Kab. Boyolali |
| 6 | Kab. Brebes |
| 7 | Kab. Cilacap |
| 8 | Kab. Demak |
| 9 | Kab. Grobogan |
| 10 | Kab. Jepara |
| 11 | Kab. Karanganyar |
| 12 | Kab. Kebumen |
| 13 | Kab. Kendal |
| 14 | Kab. Klaten |
| 15 | Kab. Kudus |
| 16 | Kab. Magelang |
| 17 | Kab. Pati |
| 18 | Kab. Pekalongan |
| 19 | Kab. Pemasang |
| 20 | Kab. Purbalingga |
| 21 | Kab. Purworejo |
| 22 | Kab. Rembang |
| 23 | Kab. Semarang |
| 24 | Kab. Sragen |
| 25 | Kab. Sukoharjo |
| 26 | Kab. Tegal |
| 27 | Kab. Temanggung |
| 28 | Kab. Wonogiri |
| 29 | Kab. Wonosobo |
| 30 | Kota Magelang |
| 31 | Kota Pekalongan |
| 32 | Kota Salatiga |
| 33 | Kota Semarang |
| 34 | Kota Surakarta |
| 35 | Kota Tegal |

| | |
|----|--------------------------|
| 36 | Kab. Bantul |
| 37 | Kab. Gunung Kidul |
| 38 | Kab. Kulon Progo |
| 39 | Kab. Sleman |
| 40 | Kota Yogyakarta |



LAMPIRAN 2
DATA PENELITIAN

| 2015 | DAU | DAK | Belanja Modal | Jumlah penduduk |
|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Kab. Banjarnegara | 862.810.552.000 | 63.731.180.000 | 278.333.398.100 | 901826 |
| Kab. Banyumas | 1.277.833.798.000 | 70.547.140.000 | 380.986.849.220 | 1635909 |
| Kab. Batang | 706.782.246.000 | 66.432.450.000 | 228.388.801.437 | 74309 |
| Kab. Blora | 848.823.612.000 | 76.481.560.000 | 267.984.607.200 | 852108 |
| Kab. Boyolali | 968.089.632.000 | 68.322.720.000 | 280.013.885.000 | 96369 |
| Kab. Brebes | 1.234.338.079.000 | 81.080.820.000 | 356.274.138.000 | 1781379 |
| Kab. Cilacap | 1.332.536.848.000 | 88.433.700.000 | 346.452.746.818 | 1694726 |
| Kab. Demak | 833.041.455.000 | 76.863.630.000 | 382.085.254.000 | 1117905 |
| Kab. Grobogan | 1.008.901.500.000 | 76.099.450.000 | 272.012.467.248 | 1351429 |
| Kab. Jepara | 935.771.120.000 | 74.258.610.000 | 186.171.964.000 | 1188289 |
| Kab. Karanganyar | 906.446.527.000 | 57.993.170.000 | 183.435.472.689 | 856198 |
| Kab. Kebumen | 1.146.008.708.000 | 69.011.970.000 | 276.330.360.000 | 1184882 |
| Kab. Kendal | 884.901.572.000 | 61.900.420.000 | 244.083.900.633 | 942283 |
| Kab. Klaten | 1.164.196.398.000 | 54.263.970.000 | 262.171.829.097 | 1158795 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------|
| Kab. Kudus | 784.919.177.000 | 61.066.830.000 | 375.069.995.000 | 831303 |
| Kab. Magelang | 996.070.014.000 | 42.235.230.000 | 272.701.298.597 | 1245496 |
| Kab. Pati | 1.086.645.667.000 | 54.130.720.000 | 185.463.899.000 | 1232889 |
| Kab. Pekalongan | 862.011.706.000 | 66.825.230.000 | 227.713.108.460 | 873986 |
| Kab. Pemalang | 1.058.982.530.000 | 76.455.810.000 | 283.606.209.314 | 1288577 |
| Kab. Purbalingga | 805.222.229.000 | 60.524.110.000 | 148.475.886.000 | 898376 |
| Kab. Purworejo | 875.528.049.000 | 69.007.890.000 | 169.301.395.162 | 710386 |
| Kab. Rembang | 723.091.447.000 | 68.626.640.000 | 175.191.157.611 | 619173 |
| Kab. Semarang | 876.672.925.000 | 24.019.480.000 | 78.394.389.559 | 1000887 |
| Kab. Sragen | 977.443.589.000 | 72.521.700.000 | 174.926.142.000 | 879027 |
| Kab. Sukoharjo | 854.457.636.000 | 53.871.130.000 | 240.338.997.000 | 864207 |
| Kab. Tegal | 1.085.549.293.000 | 50.305.370.000 | 335.924.044.000 | 1424891 |
| Kab. Temanggung | 731.733.741.000 | 61.389.760.000 | 305.690.716.400 | 745825 |
| Kab. Wonogiri | 1.031.393.472.000 | 83.152.970.000 | 253.534.950.718 | 949017 |
| Kab. Wonosobo | 748.447.761.000 | 70.676.100.000 | 270.968.478.282 | 777122 |
| Kota Magelang | 418.257.922.000 | 32.216.980.000 | 141.523.194.000 | 120792 |
| Kota Pekalongan | 421.276.527.000 | 39.335.050.000 | 174.509.294.000 | 296404 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------|
| Kota Salatiga | 400.176.755.000 | 42.475.400.000 | 190.395.933.705 | 183815 |
| Kota Semarang | 1.126.847.634.000 | 24.904.430.000 | 990.118.124.350 | 1701114 |
| Kota Surakarta | 713.300.856.000 | 3.750.100.000 | 170.840.305.000 | 512226 |
| Kota Tegal | 405.831.088.000 | 39.221.090.000 | 174.613.601.000 | 246119 |
| Kab. Bantul | 942.850.827.000 | 61.102.870.000 | 293.496.091.675 | 981164 |
| Kab. Gunung Kidul | 872.566.961.000 | 72.771.380.000 | 197.764.906.522 | 713579 |
| Kab. Kulon Progo | 657.260.489.000 | 53.805.650.000 | 221.474.528.185 | 412049 |
| Kab. Sleman | 984.410.612.000 | 14.433.000.000 | 325.805.311.899 | 1172965 |
| Kota Yogyakarta | 622.365.351.000 | 561.100.000 | 249.101.306.335 | 3691196 |

Data LN

| 2015 | DAU | DAK | Belanja Modal | Jumah penduduk |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Kab. Banjarnegara | 27,48346098 | 24,87793976 | 26,35208551 | 13,71217688 |
| Kab. Banyumas | 27,87618741 | 24,97954698 | 26,66603069 | 14,30770917 |
| Kab. Batang | 27,28398846 | 24,91945148 | 26,15431528 | 11,21598735 |
| Kab. Blora | 27,46711724 | 25,0603155 | 26,31419538 | 13,65546856 |
| Kab. Boyolali | 27,59859051 | 24,9475082 | 26,35810503 | 11,47593985 |
| Kab. Brebes | 27,84155597 | 25,11871227 | 26,59896632 | 14,39289834 |
| Kab. Cilacap | 27,91810565 | 25,20551896 | 26,57101227 | 14,34303163 |
| Kab. Demak | 27,44834924 | 25,06529865 | 26,6689096 | 13,92696696 |
| Kab. Grobogan | 27,63988323 | 25,05530687 | 26,32911374 | 14,11667311 |
| Kab. Jepara | 27,56463675 | 25,03081957 | 25,94993662 | 13,98802502 |
| Kab. Karanganyar | 27,53279788 | 24,78359108 | 25,9351288 | 13,66025694 |
| Kab. Kebumen | 27,76730633 | 24,9575458 | 26,34486294 | 13,98515375 |
| Kab. Kendal | 27,50874226 | 24,8487928 | 26,22077786 | 13,75606093 |
| Kab. Klaten | 27,78305218 | 24,71712631 | 26,29226596 | 13,96289123 |
| Kab. Kudus | 27,38884659 | 24,83523468 | 26,6503785 | 13,63074963 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kab. Magelang | 27,62708339 | 24,46652054 | 26,33164289 | 14,0350444 |
| Kab. Pati | 27,7141167 | 24,7146677 | 25,94612609 | 14,02487075 |
| Kab. Pekalongan | 27,48253469 | 24,92534654 | 26,15135238 | 13,68081964 |
| Kab. Pemalang | 27,68832969 | 25,05997876 | 26,37085253 | 14,06904907 |
| Kab. Purbalingga | 27,41438414 | 24,82630763 | 25,7236884 | 13,70834397 |
| Kab. Purworejo | 27,49809303 | 24,95748668 | 25,85494637 | 13,47356376 |
| Kab. Rembang | 27,30680153 | 24,95194663 | 25,88914354 | 13,33614 |
| Kab. Semarang | 27,49939981 | 23,902131 | 25,0850182 | 13,81639716 |
| Kab. Sragen | 27,60820642 | 25,00715166 | 25,88762968 | 13,68657089 |
| Kab. Sukoharjo | 27,47373276 | 24,70986055 | 26,20531625 | 13,6695676 |
| Kab. Tegal | 27,71310724 | 24,64137767 | 26,54015091 | 14,16960588 |
| Kab. Temanggung | 27,31868254 | 24,84050888 | 26,4458397 | 13,52224627 |
| Kab. Wonogiri | 27,66193189 | 25,14394776 | 26,25876752 | 13,76318199 |
| Kab. Wonosobo | 27,34126725 | 24,9813733 | 26,32526833 | 13,56335263 |
| Kota Magelang | 26,75936412 | 24,19575948 | 25,67572946 | 11,70182534 |
| Kota Pekalongan | 26,76655529 | 24,39538182 | 25,88524384 | 12,59947867 |
| Kota Salatiga | 26,71517217 | 24,47219092 | 25,9723716 | 12,1216851 |
| Kota Semarang | 27,75044515 | 23,93831154 | 27,62109009 | 14,34679389 |
| Kota Surakarta | 27,29316913 | 22,04504834 | 25,86399507 | 13,14652121 |
| Kota Tegal | 26,72920287 | 24,39248045 | 25,88584138 | 12,41357044 |
| Kab. Bantul | 27,57217392 | 24,83582467 | 26,40513016 | 13,7964949 |
| Kab. Gunung Kidul | 27,49470523 | 25,01058858 | 26,01034482 | 13,47804843 |
| Kab. Kulon Progo | 27,21134626 | 24,70864432 | 26,12357342 | 12,92889755 |
| Kab. Sleman | 27,61530894 | 23,39278309 | 26,50956584 | 13,97504529 |
| Kota Yogyakarta | 27,15679314 | 20,1454097 | 26,2411255 | 15,12146108 |

| 2014 | DAU | DAK | Belanja Modal | Jumlah Penduduk |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Kab. Banjarnegara | 826.044.419.000 | 61.066.040.000 | 206.494.161.626 | 895986 |
| Kab. Banyumas | 1.224.710.992.000 | 82.519.140.000 | 360.164.898.641 | 1620918 |
| Kab. Batang | 682.182.894.000 | 52.176.600.000 | 157.304.196.255 | 736397 |
| Kab. Blora | 823.874.089.000 | 61.140.660.000 | 335.136.756.246 | 848369 |
| Kab. Boyolali | 943.220.456.000 | 81.095.720.000 | 303.852.817.878 | 957857 |
| Kab. Brebes | 1.186.969.845.000 | 97.975.310.000 | 282.972.400.128 | 1773379 |
| Kab. Cilacap | 1.291.121.704.000 | 110.203.960.000 | 414.435.433.036 | 1685573 |
| Kab. Demak | 795.874.748.000 | 74.599.670.000 | 540.353.998.879 | 1106328 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Kab. Grobogan | 977.675.512.000 | 85.838.690.000 | 300.522.182.667 | 1343960 |
| Kab. Jepara | 887.768.694.000 | 81.294.110.000 | 188.924.407.454 | 1170797 |
| Kab. Karanganyar | 870.001.752.000 | 57.238.710.000 | 223.287.900.900 | 848255 |
| Kab. Kebumen | 1.125.568.884.000 | 80.709.170.000 | 465.778.357.808 | 1181006 |
| Kab. Kendal | 852.170.849.000 | 47.886.615.000 | 261.586.075.722 | 934643 |
| Kab. Klaten | 1.142.586.588.000 | 66.576.420.000 | 268.557.035.809 | 1154040 |
| Kab. Kudus | 795.851.851.000 | 41.391.675.000 | 256.850.820.705 | 821136 |
| Kab. Magelang | 965.124.427.000 | 48.736.118.000 | 319.022.187.365 | 1233695 |
| Kab. Pati | 1.043.498.355.000 | 79.852.630.000 | 224.653.195.934 | 1225594 |
| Kab. Pekalongan | 831.579.000.000 | 60.380.950.000 | 187.872.466.874 | 867573 |
| Kab. Pemalang | 1.016.813.333.000 | 54.018.555.000 | 164.388.705.445 | 1284236 |
| Kab. Purbalingga | 777.989.499.000 | 57.267.330.000 | 112.249.667.286 | 889214 |
| Kab. Purworejo | 854.737.495.000 | 57.024.620.000 | 216.762.938.712 | 708038 |
| Kab. Rembang | 700.774.721.000 | 46.206.000.000 | 151.454.913.762 | 614087 |
| Kab. Semarang | 848.736.010.000 | 67.407.340.000 | 272.265.415.043 | 987557 |
| Kab. Sragen | 946.826.641.000 | 76.469.300.000 | 267.219.055.054 | 875600 |
| Kab. Sukoharjo | 826.891.481.000 | 56.904.480.000 | 197.957.953.910 | 856937 |
| Kab. Tegal | 1.044.211.310.000 | 63.646.823.000 | 226.087.648.919 | 1420132 |
| Kab. Temanggung | 708.764.753.000 | 56.702.810.000 | 198.451.766.079 | 738915 |
| Kab. Wonogiri | 1.001.378.439.000 | 59.392.120.000 | 223.887.556.535 | 945817 |
| Kab. Wonosobo | 724.245.009.000 | 59.423.010.000 | 206.098.010.151 | 773280 |
| Kota Magelang | 417.211.449.000 | 22.365.783.000 | 133.263.104.000 | 120373 |
| Kota | | | | 293704 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Pekalongan | 412.871.094.000 | 34.173.710.000 | 159.183.156.133 | |
| Kota Salatiga | 399.083.343.000 | 24.042.788.000 | 44.245.952.708 | 181193 |
| Kota Semarang | 1.104.739.473.000 | 29.236.965.000 | 800.181.230.907 | 1672999 |
| Kota Surakarta | 710.803.934.000 | 43.848.110.000 | 286.491.756.994 | 510077 |
| Kota Tegal | 390.732.536.000 | 22.933.763.000 | 115.598.831.594 | 244998 |
| Kab. Bantul | 949.252.188.000 | 60.914.370.000 | 310.415.290.766 | 968632 |
| Kab. Gunung Kidul | 847.388.294.000 | 46.172.145.000 | 127.289.721.491 | 698825 |
| Kab. Kulon Progo | 639.409.211.000 | 47.077.300.000 | 146.576.953.515 | 405222 |
| Kab. Sleman | 952.102.502.000 | 36.504.908.000 | 282.862.049.259 | 1163970 |
| Kota Yogyakarta | 618.742.352.000 | 2.249.900.000 | 193.078.279.594 | 400467 |

| 2014 | DAU | DAK | Belanja Modal | Jumah Penduduk |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Kab. Banjarnegara | 27,43991439 | 24,83522174 | 26,05353798 | 13,70568007 |
| Kab. Banyumas | 27,83372601 | 25,1362961 | 26,60982782 | 14,29850321 |
| Kab. Batang | 27,24856363 | 24,67789996 | 25,78144732 | 13,50952465 |
| Kab. Blora | 27,43728355 | 24,83644295 | 26,53780451 | 13,65107096 |
| Kab. Boyolali | 27,57256587 | 25,11889602 | 26,43980927 | 13,77245378 |
| Kab. Brebes | 27,80242483 | 25,30798135 | 26,3686152 | 14,38839732 |
| Kab. Cilacap | 27,88653249 | 25,42559867 | 26,75018303 | 14,33761612 |
| Kab. Demak | 27,40270766 | 25,03540192 | 27,01549032 | 13,91655698 |
| Kab. Grobogan | 27,60844366 | 25,17573567 | 26,42878741 | 14,11113104 |
| Kab. Jepara | 27,51197707 | 25,1213394 | 25,96461281 | 13,97319527 |
| Kab. Karanganyar | 27,49176106 | 24,77049625 | 26,13172781 | 13,65093658 |
| Kab. Kebumen | 27,7493097 | 25,11411804 | 26,86697573 | 13,98187718 |
| Kab. Kendal | 27,47105287 | 24,59210187 | 26,29002923 | 13,74791992 |
| Kab. Klaten | 27,76431575 | 24,9216163 | 26,31632915 | 13,95877939 |
| Kab. Kudus | 27,40267889 | 24,44634561 | 26,27176129 | 13,61844403 |
| Kab. Magelang | 27,59552287 | 24,60968623 | 26,48852649 | 14,02552429 |
| Kab. Pati | 27,67359999 | 25,10344865 | 26,1378237 | 14,01893618 |
| Kab. Pekalongan | 27,44659214 | 24,82393949 | 25,9590292 | 13,67345494 |
| Kab. Pemalang | 27,64769467 | 24,71259344 | 25,82549962 | 14,06567455 |
| Kab. | 27,37997886 | 24,77099614 | 25,4439914 | 13,69809321 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Purbalingga | | | | |
| Kab. Purworejo | 27,47406024 | 24,76674894 | 26,10207014 | 13,47025304 |
| Kab. Rembang | 27,2754523 | 24,5563755 | 25,74355382 | 13,32789189 |
| Kab. Semarang | 27,46701403 | 24,93401975 | 26,33004322 | 13,8029895 |
| Kab. Sragen | 27,57638185 | 25,06015519 | 26,31133459 | 13,68266464 |
| Kab. Sukoharjo | 27,4409393 | 24,76463991 | 26,01132049 | 13,66111968 |
| Kab. Tegal | 27,67428299 | 24,87661525 | 26,14418859 | 14,16626038 |
| Kab. Temanggung | 27,28678951 | 24,76108961 | 26,01381192 | 13,51293817 |
| Kab. Wonogiri | 27,63239861 | 24,80742739 | 26,13440978 | 13,75980438 |
| Kab. Wonosobo | 27,30839558 | 24,80794736 | 26,05161767 | 13,55839649 |
| Kota Magelang | 26,756859 | 23,83079808 | 25,61559124 | 11,69835053 |
| Kota Pekalongan | 26,74640126 | 24,25472247 | 25,7933213 | 12,59032774 |
| Kota Salatiga | 26,71243611 | 23,90310091 | 24,51302974 | 12,10731804 |
| Kota Semarang | 27,73063065 | 24,09869967 | 27,40810408 | 14,33012838 |
| Kota Surakarta | 27,28966247 | 24,50399745 | 26,3809756 | 13,14231697 |
| Kota Tegal | 26,69128911 | 23,85587603 | 25,47339169 | 12,40900533 |
| Kab. Bantul | 27,57894034 | 24,83273494 | 26,46117689 | 13,78364005 |
| Kab. Gunung Kidul | 27,46542486 | 24,55564253 | 25,5697316 | 13,45715563 |
| Kab. Kulon Progo | 27,18381048 | 24,57505677 | 25,71081641 | 12,91219034 |
| Kab. Sleman | 27,58193854 | 24,32071255 | 26,36822516 | 13,96734713 |
| Kota Yogyakarta | 27,15095479 | 21,53415161 | 25,98636154 | 12,90038665 |

| 2013 | DAU | DAK | Belanja Modal | Jumah Penduduk |
|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Kab. Banjarnegara | 763.426.566.000 | 69.482.630.000 | 175.918.010.287 | 889921 |
| Kab. Banyumas | 1.127.939.938.000 | 78.662.730.000 | 313.188.975.057 | 1605579 |
| Kab. Batang | 641.663.630.000 | 49.792.440.000 | 148.222.973.774 | 729616 |
| Kab. Blora | 753.830.036.000 | 53.492.890.000 | 260.455.399.862 | 844444 |
| Kab. Boyolali | 871.685.981.000 | 59.233.500.000 | 249.111.725.695 | 951817 |
| Kab. Brebes | 1.098.999.510.000 | 82.628.900.000 | 325.840.766.312 | 1764648 |
| Kab. Cilacap | 1.197.315.060.000 | 108.157.350.000 | 421.186.662.714 | 1676089 |
| Kab. Demak | 737.911.647.000 | 76.556.190.000 | 352.309.888.384 | 1094472 |
| Kab. Grobogan | 906.666.365.000 | 104.304.440.000 | 353.074.204.294 | 1336304 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Kab. Jepara | 814.380.324.000 | 67.487.370.000 | 158.798.848.275 | 1153213 |
| Kab. Karanganyar | 810.216.582.000 | 55.203.060.000 | 148.478.744.026 | 840171 |
| Kab. Kebumen | 1.021.871.180.000 | 79.063.860.000 | 286.958.914.202 | 1176722 |
| Kab. Kendal | 788.134.078.000 | 41.931.490.000 | 155.398.900.968 | 926812 |
| Kab. Klaten | 1.066.318.427.000 | 61.175.420.000 | 186.883.543.096 | 1148994 |
| Kab. Kudus | 719.406.935.000 | 52.208.880.000 | 132.972.459.152 | 810810 |
| Kab. Magelang | 899.528.369.000 | 43.096.223.000 | 108.603.624.493 | 1221681 |
| Kab. Pati | 960.479.326.000 | 72.903.370.000 | 203.474.443.723 | 1218016 |
| Kab. Pekalongan | 768.500.117.000 | 60.587.590.000 | 184.320.225.104 | 861082 |
| Kab. Pemalang | 931.426.998.000 | 63.504.568.000 | 249.976.019.799 | 1279596 |
| Kab. Purbalingga | 719.185.020.000 | 66.641.060.000 | 112.767.369.781 | 879880 |
| Kab. Purworejo | 793.904.679.000 | 53.323.020.000 | 180.854.184.775 | 705483 |
| Kab. Rembang | 640.273.360.000 | 42.098.910.000 | 135.447.797.344 | 608903 |
| Kab. Semarang | 778.604.920.000 | 59.113.470.000 | 227.584.378.658 | 974092 |
| Kab. Sragen | 869.155.545.000 | 61.857.560.000 | 141.263.725.821 | 871989 |
| Kab. Sukoharjo | 763.462.900.000 | 53.124.680.000 | 209.691.364.140 | 849506 |
| Kab. Tegal | 957.576.304.000 | 72.524.910.000 | 215.975.068.911 | 1415009 |
| Kab. Temanggung | 651.171.674.000 | 41.627.621.000 | 103.805.509.274 | 731911 |
| Kab. Wonogiri | 917.476.557.000 | 75.705.890.000 | 192.048.802.286 | 942377 |
| Kab. Wonosobo | 665.548.034.000 | 57.950.180.000 | 138.195.097.852 | 769318 |
| Kota Magelang | 385.859.241.000 | 20.644.487.000 | 142.588.509.967 | 119935 |
| Kota Pekalongan | 384.489.368.000 | 34.721.100.000 | 177.257.508.051 | 290870 |
| Kota Salatiga | | | | 178594 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | 358.331.867.000 | 16.958.760.000 | 25.458.694.443 | |
| Kota Semarang | 1.054.002.569.000 | 14.993.022.000 | 591.011.412.262 | 1644800 |
| Kota Surakarta | 659.647.382.000 | 32.893.036.000 | 244.975.523.723 | 507825 |
| Kota Tegal | 370.642.983.000 | 30.039.185.000 | 100.804.466.696 | 243860 |
| Kab. Bantul | 854.810.634.000 | 47.196.880.000 | 183.269.840.475 | 955015 |
| Kab. Gunung Kidul | 779.069.238.000 | 59.793.058.000 | 156.373.178.937 | 693523 |
| Kab. Kulon Progo | 594.978.790.000 | 52.894.140.000 | 123.313.526.117 | 401450 |
| Kab. Sleman | 891.589.912.000 | 50.823.330.000 | 206.859.865.136 | 1147037 |
| Kota Yogyakarta | 597.212.209.000 | 6.220.630.000 | 167.079.742.204 | 397828 |

| 2013 | DAU | K | DA | Be lanja Modal | Jumah Penduduk |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Kab. Banjarnegara | 27,36108278 | 24,96434263 | 25,89328387 | 13,69888797 | |
| Kab. Banyumas | 27,75141402 | 25,08843531 | 26,4700726 | 14,288995 | |
| Kab. Batang | 27,18733006 | 24,631129 | 25,72198356 | 13,50027365 | |
| Kab. Blora | 27,34843276 | 24,70281458 | 26,28569747 | 13,6464337 | |
| Kab. Boyolali | 27,49369508 | 24,8047531 | 26,24116733 | 13,76612807 | |
| Kab. Brebes | 27,72542135 | 25,13762534 | 26,50967465 | 14,3834618 | |
| Kab. Cilacap | 27,81110272 | 25,40685295 | 26,76634195 | 14,33197366 | |
| Kab. Demak | 27,32708993 | 25,06129082 | 26,58777699 | 13,90578261 | |
| Kab. Grobogan | 27,53304037 | 25,37057977 | 26,58994408 | 14,10541815 | |
| Kab. Jepara | 27,42569332 | 24,93520631 | 25,79090413 | 13,95806252 | |
| Kab. Karanganyar | 27,42056743 | 24,73428422 | 25,72370765 | 13,64136072 | |
| Kab. Kebumen | 27,65265655 | 25,09352172 | 26,38260489 | 13,97824316 | |
| Kab. Kendal | 27,39293406 | 24,45930293 | 25,7692612 | 13,73950602 | |
| Kab. Klaten | 27,69523311 | 24,83701131 | 25,9537515 | 13,95439733 | |
| Kab. Kudus | 27,30169301 | 24,67851843 | 25,61340787 | 13,60578903 | |
| Kab. Magelang | 27,52513643 | 24,4867012 | 25,41097062 | 14,01573834 | |
| Kab. Pati | 27,59069829 | 25,0124007 | 26,03880625 | 14,01273386 | |
| Kab. Pekalongan | 27,36770655 | 24,82735592 | 25,93994044 | 13,66594502 | |
| Kab. Pemalang | 27,55998365 | 24,87437768 | 26,24463083 | 14,06205496 | |
| Kab. Purbalingga | 27,30138449 | 24,92258674 | 25,44859286 | 13,68754081 | |
| Kab. Purworejo | 27,40022924 | 24,69963397 | 25,92095693 | 13,46663795 | |
| Kab. Rembang | 27,18516105 | 24,46328769 | 25,63185214 | 13,31941426 | |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kab. Semarang | 27,38076959 | 24,80272465 | 26,1507869 | 13,78926103 |
| Kab. Sragen | 27,49078794 | 24,84810016 | 25,67389438 | 13,67853209 |
| Kab. Sukoharjo | 27,36113037 | 24,69590744 | 26,06890259 | 13,65241028 |
| Kab. Tegal | 27,58767125 | 25,00719593 | 26,09842882 | 14,16264645 |
| Kab. Temanggung | 27,20203915 | 24,45202975 | 25,36578488 | 13,5034142 |
| Kab. Wonogiri | 27,54489287 | 25,0501218 | 25,98101536 | 13,75616069 |
| Kab. Wonosobo | 27,22387665 | 24,78284951 | 25,65193228 | 13,55325969 |
| Kota Magelang | 26,67873848 | 23,75071415 | 25,68322877 | 11,69470521 |
| Kota Pekalongan | 26,67518197 | 24,27061341 | 25,90086936 | 12,58063171 |
| Kota Salatiga | 26,6047254 | 23,55405035 | 23,96032315 | 12,09287035 |
| Kota Semarang | 27,683616 | 23,43085073 | 27,10510116 | 14,31312935 |
| Kota Surakarta | 27,21497126 | 24,2165268 | 26,22442414 | 13,13789218 |
| Kota Tegal | 26,63850513 | 24,12576853 | 25,3364485 | 12,40434957 |
| Kab. Bantul | 27,4741458 | 24,57759363 | 25,93422544 | 13,76948233 |
| Kab. Gunung Kidul | 27,38136576 | 24,8141554 | 25,77551116 | 13,44953968 |
| Kab. Kulon Progo | 27,11179159 | 24,69155839 | 25,53799594 | 12,90283827 |
| Kab. Sleman | 27,51627212 | 24,65162134 | 26,05530742 | 13,95269265 |
| Kota Yogyakarta | 27,11553835 | 22,55113702 | 25,84173703 | 12,89377503 |



LAMPIRAN 3
HASIL OLAH DATA

Variables Entered/Removed^a

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|------------------------------------|-------------------|--------|
| 1 | LN DAK, LN JP, LN DAU ^b | | Enter |

- a. Dependent Variable: LN BM
b. All requested variables entered.

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,654 ^a | ,427 | ,413 | ,38108 | 1,856 |

- a. Predictors: (Constant), LN DAK, LN JP, LN DAU
b. Dependent Variable: LN BM

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 12,574 | 3 | 4,191 | 28,863 | ,000 ^b |
| | Residual | 16,846 | 116 | ,145 | | |
| | Total | 29,420 | 119 | | | |

- a. Dependent Variable: LN BM
b. Predictors: (Constant), LN DAK, LN JP, LN DAU

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -1,300 | 4,516 | | -,288 | ,774 | | |
| | LN DAU | ,834 | ,216 | ,500 | 3,858 | ,000 | ,293 | 3,408 |
| | LN JP | ,003 | ,088 | ,003 | ,029 | ,977 | ,354 | 2,824 |
| | LN DAK | ,182 | ,063 | ,237 | 2,874 | ,005 | ,728 | 1,373 |

- a. Dependent Variable: LN BM

